

MANUSIA MATI DI LUMBUNG DUNIA

Dunia kini adalah dunia yang dalam sejarah peradaban berhasil memproduksi pangan yang cukup, bahkan berlebih untuk semua orang. Saat ini dunia memiliki ketersediaan pangan jika dirata-rata akan cukup untuk mengenyangkan setiap orang lebih dari 2 kg makanan perhari: 1 kg biji-bijian dan kacang-kacangan, 1/2 kg daging, susu dan telur dan sisanya buah-buahan dan sayur-sayuran. Lebih jauh, data Bank Dunia menunjukkan ketersediaan kalori perkapita di negara berkembang telah naik dari 1,925 kkal/kapita (1961) menjadi 2,540 kkal/kapita (1992). Jumlah ini lebih besar daripada persyaratan FAO yakni sebesar 2,200 - 2,300 kkal/kapita.

Namun, dunia kini juga mencatat ironi terbesar kehidupan, di saat produksi pangan berlebih, ternyata ratusan juta orang masih harus berjuang melawan kelaparan. Simaklah data berikut. Pada tahun 2002, sebanyak 815 juta manusia di negara berkembang masih menghadapi kelaparan, 300 juta di antaranya adalah anak-anak. Mereka bergulat melawan rasa lapar dan menghadapi serangan berbagai penyakit akibat kurang gizi bahkan ancaman kematian. Satu dari tiap lima penduduk dunia menderita kekurangan gizi. Sekitar 777 juta orang mengalami kelangkaan pangan, yang tinggal selangkah lagi masuk kategori menderita kelaparan (World Food Summit, Five Years Later, 2002). Ironi lain, bahwa sebagian negara yang warganya kelaparan, justru menjadi pengeksport pangan. Brazil misalnya, pada tahun 1994 sekitar 70 juta penduduk Brazil mengalami kelaparan, sementara pada saat yang sama Brazil mengeksport makanan senilai 13 juta USD ke negara maju.

Jacques Diouf, Sekjen Badan Pangan dan Pertanian PBB (FAO) jelas menyebut bahwa penyebab utama masalah ini adalah sistem perdagangan global yang tidak adil. Perdagangan telah menjadi ikon ekonomi utama yang menjadi indikator kemajuan termasuk dalam urusan pangan. Perdagangan pangan dipercaya mampu mengatasi persoalan alokasi sumberdaya pangan dan pertanian secara efektif dan mengatasi persoalan pangan dunia melalui proses pembelian pangan. Namun, premis di atas jelas terbantahkan.



Perdagangan membuktikan bahwa aliran komoditi senantiasa bergerak kearah konsumen dengan daya beli lebih tinggi atau kepada mereka yang mampu membayar. Itulah kenapa, komoditi pangan yang bermutu selalu mengalir ke negara maju yang penduduknya memiliki daya beli yang besar. Dengan demikian, mereka yang miskin, negara berkembang hanya akan mendapatkan sisa atau tidak kebagian karena mereka minim atau tidak memiliki daya beli.

Konsep ketahanan pangan yang ada sekarang juga mengandakn ketahanan di tingkat global yang menempatkan perdagangan sebagai instrumen utama. Ilustrasi sederhananya, jika satu negara lebih menguntungkan menjual bunga maka lebih baik tidak menanam padi. Untuk memberi makan warga, cukup dibeli dari negara yang produksinya berlimpah. Itulah logika perdagangan. Persoalannya, jika ada kekeringan global yang menurunkan produksi pangan, tentu negara berkelimpahan pangan akan mengutamakan warganya dulu daripada menjual ke negara lain. Lalu, apa yang bisa diharapkan dari negara pedang bunga? Makan bangkakah?

Perdagangan pangan global di tingkat tertentu memang menjadi ancaman bagi kedaulatan pangan dan sistem pangan lokal yang telah lama ada di komunitas-komunitas negara berkembang. Tarikan liberalisasi yang kian kencang, tidak saja memalitkan sistem pangan lokal tapi juga menghancurkan kehidupan petani. Dari sebab itu, berbagai elemen masyarakat sipil di seluruh dunia, kembali menyuarakan perlunya gerakan menghidupkan kembali sistem pangan lokal dan kedaulatan pangan. Keberdayaan dan kemandirian pangan sejak dari individu rumah tangga dan komunitas lokal yang terus bertingkat ke wilayah negara merupakan acuan yang hendak dicapai dari gerakan ini. Lokalitas menjadi *after icon* yang mau diperjuangkan.

Dan, wacana kali ini coba mengurai kenapa *after icon* ini penting dan relevan untuk dilakukan..... (ISJ)

Redaksi

daftar isi

- 3 Memperkuat Kembali Sistem Pangan Lokal
- 7 24 Tahun Hari Pangan Sedunia
- 10 Benih Lokal Kekuatan Petani
- 12 PERTANIAN ORGANIK : Pertanian Masa Depan yang Menjanjikan

WACANA diterbitkan dua bulan sekali oleh ELSPAT sejak Maret 1996 untuk memperluarkan gagasan atau refleksi pengalaman sambil tetap berpikir global tanpa meninggalkan kenyalatan di lapangan.

Redaksi mengundang Anda untuk mengirimkan tulisan yang berkaitan dengan hasil refleksi kegiatan lapangan, kajian tentang kebijakan pembangunan, alternatif pemecahan masalah dan gagasan lain yang segar dan orisinal tentang pertanian berkelanjutan, pemberdayaan petani dan perempuan

Redaksi Indro Surono, Any Sulityawali
Tata letak Anton Waspo Distribusi
 Yuningsh Alam Redaksi Jl. Kalasan No 15 Perum Cimangui Permai I Bogor 16310
 Telp/fax 0251 - 323 089 Alamat Surat PO BOX 2026 Bogor Timur 16020 Email : elsppat@elsppat.or.id Wacana dapat juga diakses di www.elsppat.or.id

Utama

Memperkuat Kembali Sistem Pangan Lokal

Oleh
Witoro¹

Pada tahun 2002, sebanyak 815 juta manusia di negara berkembang masih menghadapi kelaparan, 300 juta di antaranya adalah anak-anak. Mereka bergulat melawan rasa lapar dan menghadapi serangan berbagai penyakit akibat kurang gizi bahkan ancaman kematian. Satu dari tiap lima penduduk dunia menderita kekurangan gizi. Sekitar 777 juta orang mengalami kelangkaan pangan, yang tinggal selangkah lagi masuk kategori menderita kelaparan.

(World Food Summit, "Five Years Later", Menghapus Kemiskinan adalah Melawan Ketidakkadilan, Kompas, 17 /6/02)

Problema Pangan dan Pertanian

Penyebab besarnya jumlah orang lapar di dunia dan juga penduduk miskin dikarenakan pasar global untuk komoditas pertanian masih saja belum adil. Dari tahun 1999 sampai 2000, bantuan berkonsesi dari negara maju dan pinjaman dari lembaga keuangan internasional turun 50 persen yang pertanian yang merupakan gantungan hidup 70 persen masyarakat miskin dunia.

Oleh karena kurangnya komitmen tersebut, jumlah orang yang kekurangan makan hanya berkurang enam juta orang per tahun dari target 22 juta orang seperti yang dideklarasikan tahun 1996. Dengan kecepatan pengurangan yang berjalan lambat itu, maka target 400 juta orang miskin dan lapar bisa diperbaiki kesejahteraan, baru akan tercapai 45 tahun lagi.²

Carut marut problema pangan dan pertanian di atas disebabkan oleh berbagai aspek yang saling terkait dan mempengaruhi. Penyebab kurang pangan disebabkan antara lain karena ketidadaan akses terhadap sumber-sumber produksi pangan seperti tanah, air, input pertanian, modal, dan teknologi. Di negara-negara sedang berkembang, penyebab utama rawan pangan adalah lemahnya akses terhadap tanah untuk memproduksi pangan.³

Cara Pandang Keberlanjutan

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk memahami masalah pangan dan kemiskinan secara menyeluruh adalah dengan menggunakan kerangka kerja *sustainable livelihood* yang dikembangkan oleh DIDD⁴ dan konsep *entitlement*

3

4

yang diperkenalkan Amartya Sen⁵. Seperti semua kerangka kerja lainnya, bentuk ini merupakan penyederhanaan atas keragaman dan kekayaan mengenai kehidupan.

Dalam bentuk paling sederhana, kerangka kerja ini menggambarkan manusia (individu maupun kelompok) merupakan penggerak berbagai aset dan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mengatasi berbagai masalah dan ancaman. Manusia dalam hal ini memiliki akses terhadap berbagai aset produktif yang dapat dikelola untuk memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan hidup lainnya.

Chambers dan Conway mendefinisikan kehidupan berkelanjutan sebagai: "suatu kehidupan yang meliputi kemampuan atau kecakapan, aset-aset (simpangan, sumberdaya, klaim dan akses) dan kegiatan yang dibutuhkan untuk sarana untuk hidup: suatu kehidupan dikatakan berkelanjutan jika dapat mengatasi dan memperbaiki diri dari tekanan dan bencana, menjaga atau meningkatkan kecakapan dan aset-aset, dan menyediakan kehidupan berkelanjutan untuk generasi berikutnya; dan yang memberi sumbangan terhadap kehidupan-kehidupan lain pada tingkat lokal dan global dalam jangka pendek maupun jangka panjang"⁶

Ada lima sumber kehidupan yang dimiliki oleh setiap individu atau unit sosial yang lebih tinggi di dalam upaya mengembangkan kehidupannya yaitu : *humane capital, social capital, natural capital, physical capital dan financial capital*.

Hubungan individu atau unit sosial yang lebih tinggi terhadap pangan didasarkan pada konsep *entitlement* atau hak terhadap pangan. Dalam

konsep ini, memproduksi dan mendapatkan pangan bagi manusia adalah hak asasi yang tampak dalam beberapa cara manusia dalam mengakses pangan yaitu: *direct entitlement, exchange entitlement, trade entitlement, dan social entitlement*.

Sistem pangan individu, keluarga atau masyarakat yang lebih luas bukanlah sesuatu yang statis tetapi dinamis. Dinamika ini antara lain dipengaruhi oleh tingkat kerentanan (*vulnerability*) dan kemampuan individu atau unit sosial yang lebih besar dalam menghadapi perubahan. Perubahan itu antara lain *shock* perubahan mendadak dan tidak terduga, *Trend* perubahan yang masih dapat diamati dan *Seasonality* atau musiman yang dapat diperkirakan dengan hampir pasti.

Setiap individu dan unit sosial yang lebih besar mengembangkan sistem penyesuaian diri dalam merespon perubahan tersebut. Respon itu bersifat jangka pendek yang disebut *coping mechanism* atau yang lebih jangka panjang yang disebut *adaptive mechanism*.

Mekanisme dalam menghadapi perubahan dalam jangka pendek terutama bertujuan untuk mengakses pangan (*entitlement*), sedangkan jangka panjang bertujuan untuk memperkuat sumber-sumber kehidupannya (*livelihood assets*). Ketidaktahuan menyesuaikan diri dalam jangka pendek akan membawa ke kondisi rawan pangan. Penyesuaian rawan pangan yang tidak memperhitungkan aspek penguatan sumber-sumber kehidupan dalam jangka panjang justru tidak akan menjamin keberlanjutan ketahanan pangan individu maupun unit sosial yang lebih tinggi.

Peminggiran Sistem Pangan Lokal

Situasi dan kondisi individu, keluarga, masyarakat maupun unit sosial yang lebih tinggi terkait dan dipengaruhi oleh berbagai faktor dari luar. Sistem pangan sangat dipengaruhi oleh struktur (institusi dan tingkatannya) dan proses (kebijakan) di

⁵ Sen, Amartya, 1991, Poverty and Famines. An Essay on Entitlement and Deprivation.

⁶ Chambers, R. and G. Conway (1992) Sustainable rural livelihoods: Practical concepts for the 21 st century.

IDS Discussion Paper 296. Brighton: IDS. (pp.7-8)

² Kompas, Senin, 17 Juni 2002, World Food Summit dan Kelangkaan Pangan
³ Seeds of Hope: Feeding the World Through Community-Based Food Systems, Salzburg Seminar 398. © 2002, W.K. KELLOGG FOUNDATION
⁴ Departement for International Development (DIDD), Sustainable Livelihoods Manual, 1999

¹ Witoro, adalah koordinator KRKP. Artikel ini merupakan versi ringkas dari makalah yang dibawakan dalam lokakarya Forum Pendamping Petani di Bogor September 2003. Versi lengkap bisa diakses di www.elsppat.or.id

dalam sistem tersebut. Pendekatan *Sustainable Livelihood* menekankan pemahaman akan keterkaitan antara persoalan mikro dan makro.

Secara mikro sebenarnya sistem pertanian ladang dan sawah menjadi andalan rakyat untuk memenuhi kebutuhan pangan ini. Sebagaimana tampak dalam sejarah pertanian Indonesia. Meskipun tidak pernah mendapat perhatian semua penguasa di Indonesia namun demikian masih terus berlahan sebagai upaya untuk mempertahankan hidup.

Sejarah pertanian Indonesia sudah dimulai jauh sebelum penjajah datang. Ladang sebagai bentuk miniaturnya hutan tropis telah lama dikembangkan. Begitu juga dengan model sawah, yang tampak dari pusat2 pengembangan kerajaan. Kehadiran Belanda ke Indonesia, khususnya Jawa, adalah untuk memperoleh produk pertanian yang dapat dijual di pasaran Dunia. Terjadilah proses kemerosotan usaha tani subsisten pada periode tanam paksa hingga Indonesia merdeka. Upaya radikal mengubah keadaan ini lewat UUPA tahun 60 kandas bersama dengan tumbangnya orde lama. Kolonialisme itu kembali lagi dalam wajah barunya dengan semakin memerosotkan akses rakyat terhadap sumber-sumber agraria yang menjadi alat produksi paling penting bagi usaha tani tanaman pangan rakyat.

Contoh paling kuat adalah, Revolusi Hijau yang tidak ditujukan untuk memperkuat sistem pangan lokal yang telah berkembang sebelumnya. Bersamaan dengan itu pemerintah Orde Baru juga mengembangkan kebijakan sentralisasi pengelolaan desa yang dilakukan dengan melakukan pengaturan-pengaturan berkalian dengan kedudukan desa yang berarti merampas otonomi desa.

Gejala yang Mendunia

Dalam tataran makro persoalan pangan dan pertanian yang dihadapi Indonesia saat ini juga tidak dapat dilepaskan dari proses liberalisasi perdagangan dunia. Liberalisasi perdagangan

WACANA **ELSPAT** Edisi 29/VI Oktober 2003

mengubah fungsi pangan yang multi dimensi menjadi sekadar komoditas perdagangan. Bahkan WTO – Badan Perdagangan Dunia - mengartikan ketahanan pangan sebagai *‘ketersediaan pangan di pasar’*. Konsep ini dalam praktiknya memaksa rakyat di negara-negara sedang berkembang untuk memenuhi pangan yang akan dipenuhi oleh negara-negara maju melalui mekanisme pasar bebas. Fakta tersebut menunjukkan bahwa pangan telah menjadi bagian dari skema besar liberalisasi perdagangan.

Kuatnya tekanan dari luar dan lemahnya posisi tawar Indonesia menyebabkan Indonesia menerapkan kebijakan liberalisasi perdagangan pangan. Liberalisasi ini diwujudkan antara lain dalam pencabutan subsidi untuk petani, privatisasi badan usaha logistik dan penurunan tarif impor produk pangan. Kebijakan pangan nasional dengan demikian mengabaikan potensi dan kemampuan rakyat dalam mengelola sistem pangan mereka secara mandiri.

Upaya internasional untuk mengatasi persoalan pangan sebenarnya sudah tercermin sejak World Food Summit tahun 1974 dan 1996. Bahkan para pemimpin dunia yang hadir dalam WFS tahun 1996 (kembali) mendeklarasikan bersama untuk *‘mencapai ketahanan pangan bagi setiap orang dan melanjutkan upaya untuk menghilangkan kelaparan di seluruh negara’*.

Ketahanan pangan dalam hal ini diartikan sebagai kondisi tersedianya pangan yang memenuhi kebutuhan setiap orang setiap saat untuk hidup sehat, aktif dan produktif. Namun nyatanya situasi pangan dunia lima tahun setelah Konferensi Pangan Dunia tahun 1996 terlihat tidak menunjukkan perkembangan sesuai yang diharapkan

Kedaulatan Pangan

Sistem pangan nasional (swasembada pangan nasional) dan sistem pangan global (liberalisasi perdagangan dunia) tidak dapat menjamin

terpenuhinya hak rakyat atas pangan secara berkelanjutan. Kesadaran ini kemudian mendorong beberapa kalangan untuk menengok kembali sistem pangan lokal yang telah berkembang jauh sebelumnya dan menjadi fondasi sistem pangan rakyat.

Meskipun diletartarkan oleh hampir semua penguasa di Indonesia namun ratusan ribu komunitas yang tersebar di seluruh pelosok Nusantara memiliki sistem pangannya masing-masing yang khas serta jenis tanaman pangan yang beragam yang dibudidayakan di ladang maupun di sawah. Setiap komunitas yang telah bertani menetap, mengembangkan sendiri sistem pengelolaan sumber-sumber agraria, inovasi dalam benih dan teknik bercocok tanam, pengembangan infrastruktur, penyimpanan, distribusi atau perdagangan, maupun dalam mengolah pangannya.

Kenyataan di atas menunjukkan perlunya perubahan secara mendasar dan menyeluruh yang tercermin dalam konsep **Kedaulatan Pangan**⁷. Konsep ini memungkinkan petani perempuan dan laki-laki berperan aktif dan produktif dalam menciptakan sistem pertanian berkelanjutan berdasarkan pada sumberdaya dan kearifan lokal tanpa diskriminasi, di atas kepentingan perdagangan.

Jelas bahwa konsep ini berbeda dengan konsep ketahanan pangan yang tidak mempedulikan dari mana pangan diproduksi dan hak rakyat atas sumberdaya produktif. Dalam konsep kedaulatan pangan, hak rakyat tidak terbatas pada akses untuk memperoleh pangan tetapi juga hak untuk memproduksi dan mendistribusikan pangan.

Mengingat pangan merupakan kebutuhan dasar dan hak asasi manusia, maka untuk untuk mewujudkannya diperlukan keterlibatan rakyat

⁷ Konsep ini digagas di Indonesia secara khusus oleh Koalisi rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) selengkapnya hubungan penulis di nastar.bogor@indo.net.id

dalam penentuan kebijakan terkait dengan proses produksi, distribusi dan konsumsi pangan. Dalam kerangka itu pula maka saat ini sebenarnya peluang untuk pengembangan sistem pangan lokal mendapatkan momen yang tepat seiring dengan kebijakan otonomi daerah yang bergulir sejak tahun 1999. Kebijakan ini memberi harapan terhadap perubahan paradigma pembangunan yang sentralistis menjadi desentralistis dan demokratis. Wacana ini juga mencakup Otonomi Desa Murni, di mana pemerintahan desa akan memainkan peran utama dalam proses pembangunan.

Hal penting yang terkandung dalam otonomi desa adalah kewenangan dalam mengelola berbagai sumberdaya desa agar dapat memenuhi kebutuhan, memperoleh pendapatan dan memenuhi kebutuhan lainnya. Di antara berbagai aset desa, aset sosial merupakan aset paling penting bagi berkembangnya otonomi desa.

Pengalaman The International Center for Tropical Agriculture (CIAT)⁸ di Kolumbia, Amerika selatan dalam mendampingi komunitas dan membantu petani lokal meningkatkan produksi pangan dengan memberdayakan mereka melalui riset dan menentukan sendiri teknologi dan praktek pertanian baru.

Konsep yang digunakan CIAL berkembang cepat di Amerika Latin sejak dimulai tahun 1990 dengan lima CIAL. Tahun 2001, telah berkembang lebih dari 250 CIAL di in delapan negara Amerika Latin. Berbagai potensi yang terkandung dalam sistem pangan lokal inilah yang sangat mungkin dapat mengatasi persoalan pangan pada tingkat komunitas. *“ Community-based food system menawarkan kepada rakyat suatu peluang di mana mereka dapat meningkatkan pendapatan, penguasaan mereka dan kapasitas untuk memproduksi, dan secara mendasar suatu lahan lapang di mana mereka dapat menjamin ketahanan pangan mereka pada masa mendatang.”*⁹

⁸ Seeds of Hope

WACANA **ELSPAT** Edisi 29/VI Oktober 2003

24 Tahun Hari Pangan Sedunia

Oleh :
Any Sulistyowati

Dua puluh empat tahun setelah peringatan HPS, dunia masih jauh dari bebas kelaparan dan kemiskinan. Dari 4.4 milyar jiwa di negara-negara berkembang tiga per limanya tidak memiliki akses terhadap sanitasi mendasar; sepertiga tidak memiliki akses ke air bersih; seperlima tidak memiliki tempat tinggal yang memadai; seperlima tidak dapat menyelesaikan sekolah dasar sampai tahun kelima; seperlima tidak memiliki akses terhadap fasilitas kesehatan; dan seperlima tidak cukup mengonsumsi karbohidrat dan protein.

WACANA **ELSPAT** Edisi 29/VI Oktober 2003

Tanggal 16 Oktober ditetapkan sebagai Hari Pangan Sedunia oleh FAO sejak tahun 1979. Sampai sekarang lebih dari 150 negara memperingatinya. Dengan peringatan ini diharapkan FAO akan secara konsisten terus mencari solusi jangka panjang untuk menyelesaikan masalah pangan dan kemiskinan. Tujuan besar HPS adalah menjamin pangan sebagai hak asasi manusia, baik untuk generasi sekarang maupun di masa yang akan datang.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk memerangi kelaparan dan kemiskinan di seluruh dunia. Pada tahun 2000, para pemimpin dunia sepakat untuk memerangi kelaparan, kemiskinan dan penyakit. Tahun 2002 pada ajang World Food Summit, Five Years Later, para pemimpin dunia kembali berkomitmen untuk melawan kelaparan.

Namun, kemajuan atas perang melawan kelaparan dirasa sangat lambat. Diperkirakan target World Food Summit untuk mengurangi selangh jumlah orang yang kelaparan di seluruh dunia pada tahun 2015 tidak akan tercapai. FAO memperkirakan 840 juta orang masih dalam kondisi kelaparan yang parah, 799 juta di antaranya di negara-negara berkembang. Memang jumlah orang yang kelaparan terus menurun sekitar 2.5 juta jiwa per tahun selama 8 tahun terakhir. Jika ini terus berlangsung, target World Food Summit baru akan tercapai pada tahun 2115 alias terlambat 100 tahun.

Di negara Sub-sahara Afrika di mana sepelempat jumlah orang kelaparan bermukim, kemajuan terjadi paling lambat. Dari 28 negara, selama tahun 1980-1996 hanya 10 negara yang membuat kemajuan kecil, sementara sisanya masih kekurangan gizi. Di negara maju dan transisipun, 34 juta orang terancam keamanan pangannya.

Apakah tidak ada cukup pangan di dunia ini?

Saat ini dunia memiliki ketersediaan pangan yang paling besar sepanjang sejarah. Jika dirata-rata akan cukup untuk menyediakan setiap orang lebih dari 2 kg makanan perhari: 1 kg biji-bijian dan kacang-kacangan, 1/2 kg daging, susu dan telur dan sisanya buah-buahan dan sayur-sayuran. Data Bank Dunia menunjukkan ketersediaan kalori perkapita di negara berkembang telah naik dari 1,925 kkal/kapita (1961) menjadi 2,540 kkal/kapita (1992). Jumlah ini lebih besar daripada persyaratan FAO yakni sebesar 2,200-2,300 kkal/kapita.

Di antara negara-negara yang penduduknya mengalami kelaparan, banyak diantaranya yang mengekspor makanan. Misalnya, pada tahun 1994 Brazil memiliki 70 juta penduduk yang kelaparan, sementara pada saat yang sama Brazil mengekspor makanan senilai 13 juta USD.

Mengapa hal ini terjadi?

Meskipun kecukupan pangan memang penting, saat ini kecukupan pangan bukanlah indikator utama keberhasilan pembangunan. Keberhasilan pembangunan saat ini diukur dengan satuan uang yang terkenal dengan istilah GDP (Gross Domestic Product). GDP akan semakin tinggi jika semakin banyak transaksi dilakukan, meskipun secara riil, jumlah produknnya tidak bertambah. GDP diperoleh dari transaksi perdagangan, karena itulah negara-negara yang mengejar GDP yang sebanyak-banyaknya giat melakukan perdagangan.

Perdagangan yang menguntungkan hanya akan terjadi jika produk dijual dengan harga tertinggi. Karena itulah lewat mekanisme perdagangan, produk-produk akan mengalir kepada pihak yang mampu membeli (memiliki

uang). Ini juga berlaku untuk produk pangan. Lewat mekanisme perdagangan, pangan akan bergerak ke arah mereka yang mampu membeli, meskipun mereka sudah cukup pangan dan bukan kepada orang yang kelaparan dan miskin sehingga tidak mampu membeli.

Dalam skala negara, hal yang sama terjadi. Jika harga pangan di luar negeri lebih mahal, mengapa harus menjual di dalam negeri? Apalagi sekarang ketika hambatan-hambatan perdagangan seperti tarif sudah makin dihilangkan. Inilah yang sekarang tengah terjadi.

Jika lebih menguntungkan menjual bunga potong, mengapa harus memproduksi pangan yang harganya murah? Lebih baik kita ekspor bunga dan membeli makanan dari luar negeri.

Apa bahayanya kondisi ini?

Jika kita sentil ke membeli pangan impor, maka petani-petani lokal yang biasa memproduksi pangan kita akan kekurangan pembeli. Apalagi jika pangan impor itu harganya murah (yang seringkali karena disubsidi besar-besaran di negara asalnya), petani-petani kita (yang subsidiya makin berkurang karena desakan IMF) tentu tidak dapat bersaing, lalu akhirnya gulung tikar dan kehilangan mata pencaharian. Akhirnya penduduk desa pindah ke kota. Kalau untung, mereka bisa menjadi kuli dan buruh kasar; kalau tidak ya... jadi pengangguran. Kota menjadi semakin padat, penuh, dan sesak. Sudah merupakan hukum alam: makin banyak pengangguran, makin banyak kriminalitas.

Dalam jangka pendek, mungkin kita akan untung karena dapat membeli makanan impor dengan harga yang murah. Tetapi bayangkan jika tiba-tiba dunia mengalami kekeringan global sehingga produksi pangan menurun? Tentu harga pangan akan naik. Negara-negara penghasil pangan tentu akan mengamankan

WACANA **ELSPAT** Edisi 29/VI Oktober 2003

kebutuhan dalam negerinya lebih dulu baru diekspor. Lalu jika kita terbiasa impor, kita mau makan apa?

Masalah kedua, tentang keadilan. Seorang kawan saya membuat penelitian tentang rantai komoditi. Dari penelitiannya diketahui, bahwa dalam komponen harga beras, petani yang memproduksi beras mendapatkan bagian keuntungan yang paling kecil, dan yang mendapat keuntungan terbesar adalah para pedagang. Jika rantainya makin panjang, maka bagian keuntungan petani makin kecil. Hal yang sama juga berlaku untuk komoditi yang lain seperti pisang dan kopi. Dengan membeli makanan yang rantainya panjang, maka sumbangan kita pada hidup petani makin kecil. Jadi kalau kita mau mendukung petani, beli lah produk langsung dari petani.

Masalah ketiga, produk yang rantainya lebih panjang biasanya dampak lingkungannya makin besar. Antara lain dari polusi dan energi yang dibutuhkan untuk pengangkutan dan penyimpanannya.

Masalah keempat, produk yang rantainya lebih panjang biasanya butuh waktu yang lebih lama untuk sampai ke tangan kita. Konsekuensinya, produk menjadi kurang segar lagi atau kualitasnya sudah menurun.

Lalu bagaimana kita menyikapinya?

Ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Langkah paling aman tentunya, menanam makanan kita sendiri. Dengan menanam pangan kita sendiri kita dapat menjamin kualitas dan kualitasnya sesuai yang kita inginkan.

Jika itu terlalu sulit, usahakan memproduksi pangan secara mandiri dalam skala komunitas. Atau jika membeli pangan langsung dari produsennya. Dengan demikian, pertama, keuntungan akan langsung ke produsen dan

WACANA **ELSPAT** Edisi 29/VI Oktober 2003

mungkin kita akan mendapat harga lebih murah; kedua, kita dapat melihat bagaimana pangan kita diproduksi. Hal ini akan menjamin kualitas pangan kita dan membuat kita lebih menghargai kerja petani yang menghasilkan pangan kita.

Jika ini tidak mungkin, ketika kita membeli pangan dari pedagang, tanyakan darimana asal produk tersebut dan bagaimana prosesnya. Jika ia tidak tahu, jika terus sering ditanya ia akan berusaha mencari jawabannya dan akan meningkatkan kesadarannya. Jika kita membeli dari supermarket, carilah produk yang jelas asal-usulnya. Misalnya produk-produk yang mencantumkan label fair trade. Dengan memilih produk semacam itu, kita menjamin produsen pangan memperoleh pembagian keuntungan yang adil dan dapat menjamin kelangsungan hidup dan usahanya.

Dengan menjadi konsumen pangan yang sadar, kita kemudian secara bersama dapat membangun aliansi internasional melawan kelaparan. Itulah tema peringatan hari pangan sedunia tahun ini ♦

Teknologi

Benih Lokal Kekuatan Petani

Oleh :

Darsin⁹

Uji Coba Padi Lokal

Pada pertengahan tahun 2000 kami mencoba padi Pandan Wangi yang berasal dari Boyolali dengan penerapan pupuk kompos dan pestisida alami. Untuk tahap pertama, kurang berhasil dengan produksi 60-70% dibanding padi unggul. Bila padi unggul produksinya 4,5

⁹ Petani Kedung Poh, Nglipar, Gunung Kidul, Yogyakarta. Tulisan ini diambil dari buku Belajar dari Petani, Kumpulan Pengalaman Bertani Organik, Wangsit, Si dan Daniel Supriyana (ed), terbitan bersama SPTN-HPS, LESMAN, Mitra Tani dengan dukungan OXFAM GB, VSO/SPARK, CRS, 2003.

– 5 ton/ha, hasil uji coba tahap pertama yang kami lakukan berproduksi sekitar 3,5 – 3,75 ton/ha.

Berdasar pengamatan yang kami lakukan, salah satu penyebabnya adalah rendahnya daya tumbuh benih. Benih yang kami peroleh daya tumbuhnya hanya 60%. Dengan pemupukan seperti biasa membuat tanaman padi rebuh. Masalah ini kemudian dibahas dalam pertemuan kelompok. Pertemuan menghasilkan kesepakatan bahwa terlalu banyak menggunakan pupuk kimia akan menjadikan tanaman mudah rebuh. Dan disimpulkan bahwa padi Pandan Wangi kurang begitu membutuhkan pupuk kimia seperti halnya padi jenis unggul.

Bersama leman-teman petani tiga kelompok di desa Kedung Poh, pada musim tanam berikutnya mencoba lagi, ternyata hasilnya ada peningkatan dibandingkan uji coba pada tahap pertama. Pemupukan yang dilakukan adalah pupuk dasar kompos, pupuk susulan masih menggunakan pupuk ponska, namun dosisinya diturunkan 50% dari biasa, begitu juga pupuk susulan kedua menggunakan ponska dengan dosis 50% dari biasa. Ternyata hasil panennya sudah mendekati hasil padi unggul. Bila padi unggul di Nglipat dan sekitarnya produksinya saat itu 4,5 – 5 ton/ha, hasil uji coba tahap kedua mencapai 4,5 – 4,65 ton/ha.

Pengembangan kompos dan bakteri stimulan

Karena benih lokal memerlukan banyak pupuk kompos, maka kami bersama kelompok mengembangkan kompos dengan menggunakan bakteri stimulan (penunjang). Ternyata kegiatan ini sangat membantu petani dalam menekan biaya pupuk yang harus dikeluarkan. Pengembangan kompos dijalankan petani secara individu. Bila ada masalah yang timbul dibahas dalam pertemuan kelompok yang secara rutin kami lakukan.

WACANA **ELSPAT** Edisi 29/VI Oktober 2003

Pada tahap awal penerapan pupuk kompos memang agak sulit dan banyak kendala. Setelah terbiasa gampang dilakukan dan banyak manfaatnya.

Manfaat yang kami rasakan dengan menerapkan pupuk kompos antara lain:

1. Mengembalikan kesuburan tanah yang sudah rusak
2. Tanah menjadi gembur dan mudah diolah
3. Tanaman lebih tahan kering
4. Rasa beras yang dihasilkan lebih enak

Proses Pembenhian

Belajar dari pengalaman uji coba benih lokal, khususnya tentang rendahnya daya tumbuh (benih yang kami lima hanya 60%). Bersama LESMAN dan 18 kelompok yang ada di Kecamatan Nglipat sepakat membentuk forum benih dengan kegiatan:

- ♦ Identifikasi benih lokal yang ada di Gunung Kidul
- ♦ Koleksi benih lokal untuk uji coba
- ♦ Uji coba untuk penelitian
- ♦ Penelitian untuk pengembangan

Dari koleksi yang kami dan teman-teman lakukan berhasil dikumpulkan 18 varietas padi dan ketan antara lain: padi Mayangan, Manurun, Tangkilan, Srunen, Slegreng, Pandanwangi, Mentihkwangi, Molok, Mandel, Langsep, Cempo Putih, Singkarak, sedang jenis ketan: Glempto, salome, Serang, Hiltan.

Uji coba yang dilakukan ada dua tingkat, yaitu pada tingkat individu dan kelompok. Percobaan di tingkat individu dilakukan di lahan masing-masing, sedangkan untuk kelompok dilaksanakan di lahan uji coba. Hasilnya digabungkan dan dibahas dalam pertemuan forum bulanan yang dihadiri oleh perwakilan kelompok anggota forum benih.

Dari pengalaman yang ada ternyata hasil yang diperoleh hamper sama. Melalui SL benih, tukar pengalaman tentang seluk beluk benih,

WACANA **ELSPAT** Edisi 29/VI Oktober 2003

untuk tahap pertama hasil masih jauh dari yang diharapkan. Untuk tahap selanjutnya dengan pembenaran di sana-sini, kami bersama teman-teman yakin hasilnya akan lebih baik, sebab merupakan proses mempertemukan pendapat dari perwakilan 18 kelompok tidaklah mudah. Namun kami petani Nglipar khususnya dan petani Gunung Kidul umumnya yakin bahwa, benih lokal akan kembali menjadi kekayaan petani. Hal ini terbukti dari makin banyaknya dukungan dari teman-teman petani dan pengakuan dari teman-teman PPL serta Dinas Pertanian Kecamatan.

Dari pengamatan yang kami lakukan, ternyata ada perbedaan antara benih padi unggul dengan benih padi lokal. Perbedaan terletak pada akar. Akar benih lokal lebih panjang 2-3 cm, sehingga benih lokal lebih tahan kering bila dibandingkan dengan benih unggul. Batang padi lokal juga lebih kuat dari padi unggul, kelebihan padi lokal lain adalah bisa ditanam lebih dari satu kali dengan hasil sama atau lebih banyak dibanding musim tanam sebelumnya. Benih lokal yang kami kembangkan telah tersebar sampai ke desa-desa sekitar bahkan sampai ke kecamatan lain.

Tahun 1996 kami mewakili kelompok untuk sharing pengalaman ke NTB selama 21 hari tentang pertanian alami dan penerapan PHT, budi daya sayuran dan padi yang selama ini kami dan teman-teman lakukan di daerah Gunung Kidul.

Demikian pengalaman yang dapat kami sajikan. Banyak karangnya kami mohon masukan dari leman-teman agar di kemudian hari dapat kami perbaiki bersama teman-teman petani di daerah kami ♦

Cakrawala

PERTANIAN ORGANIK : Pertanian Masa Depan yang Menjanjikan

Oleh :

Indro Surono

Dewasa ini pertanian organik (PO) berkembang cukup pesat di Indonesia. Ini merupakan salah satu pinda positif bahwa PO mulai mendapat tempat di hati masyarakat, baik produsen maupun konsumen. Namun, demikian perkembangan yang positif ini perlu dicermati agar tidak memunculkan bias-bias yang justru merugikan kehidupan di masa depan. Di sisi lain, kendala pengembangan PO di Indonesia juga masih besar, bahkan lebih besar dibandingkan laju perkembangannya. Ada banyak faktor yang menyebabkannya, sehingga tak heran jika sampai kini PO masih menjadi wacana marginal dan diragukan kemungkinannya sebagai pertanian masa depan yang menjanjikan.

Faktor Penunjang PO

Perkembangan PO di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perkembangan PO dunia, bahkan dapat dikatakan pemicu utama PO domestik adalah karena lingginya permintaan PO di negara-negara maju. Tingginya permintaan PO di negara-negara maju dipicu oleh (1) meningkatnya kesadaran lingkungan dan gaya hidup alami dari masyarakat, (2) dukungan kebijakan pemerintah nasional, (3) dukungan industri pengolahan pangan, (4) dukungan pasar konvensional (supermarket menyerap 50% produk PO), (5) adanya harga premium di tingkat konsumen, (6) adanya label generik, (7) adanya kampanye nasional PO secara gencar (Hamm, 2000).

Upaya di atas masih belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Sebagai ilustrasi, pertumbuhan permintaan PO dunia mencapai 15-20% per tahun, namun pangsa pasar yang mampu dipenuhi hanya berkisar antara 0,5-2% dari keseluruhan produk pertanian. Meski di Eropa penambahan luas areal PO terus meningkat dari rata-rata dibawah 1% (dari total lahan pertanian) tahun 1987, menjadi 2-7% di tahun 1997 (tertinggi di Austria mencapai 10,12%), namun tetap saja belum mampu memenuhi pesatnya permintaan (Jolly, 2000). Inilah kemudian yang memacu permintaan produk PO dari negara-negara berkembang.

Selain faktor di atas, perkembangan PO di Indonesia juga didorong oleh munculnya keadaran konsumen akan pentingnya produk-produk sehat dan ramah lingkungan, khususnya di kalangan kelas menengah perkotaan. Sebagian lagi, didorong oleh kampanye dan advokasi aktivis LSM baik dalam isu lingkungan maupun pendampingan petani. Di kalangan petani sendiri mulai muncul kesadaran untuk

WACANA **ELSPAT** Edisi 29/VI Oktober 2003

menerapkan PO, terutama di basis yang didampingi LSM atau area yang belum tersentuh kebijakan Revolusi Hijau.

PO, Malthusianisme dan Reduksionisme

Dibalik kabar baik mengenai PO sebagaimana disebut di muka, secara obyektif masih banyak kendala dalam pengembangannya. Bahkan, kendala ini masih lebih besar dan kuat dibanding kemajuannya. Secara faktual perilaku PO masih sangat sedikit di seluruh dunia, yakni kurang dari 2 % terhadap seluruh perilaku pertanian yang ada.

Kendala yang ada jika ditilik lebih jauh, ada yang berakar dari kesangsian mengenai kemampuan PO dalam memecahkan persoalan pemenuhan pangan dan keberlanjutan kehidupan. Argumen pertama yang biasa mengemuka adalah anggapan bahwa produktivitas PO rendah sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan pangan yang terus meningkat. Argumen kedua, PO dianggap sebagai pertanian masa lalu yang tidak produktif dan di lingkar tertentu anti teknologi. Argumen ketiga, PO tidak layak secara ekonomis dan karenanya tidak menguntungkan.

Kesangsian PO tidak mampu menyelesaikan persoalan kebutuhan pangan sudah menjadi perdebatan lama. Menurut para birokrat, akademisi dan pembuat keputusan publik, PO secara teknis dianggap tidak mampu memberikan produktivitas hasil yang tinggi, sehingga tidak bisa menjamin ketersediaan pangan yang cukup bagi manusia. Jika dilihat lebih dalam, pemikiran ini beranjak dari 'kekuatiran Malthusian' yang menganggap bahwa pertambahan manusia lebih cepat daripada laju pangan. Kekuatiran inilah yang mendasari pencarian teknologi

WACANA ELSPPAT Edisi 29/VI Oktober 2003

yang mampu melipatgandakan hasil pangan dan pertanian.

Namun, teknologi yang berkembang kemudian justru teknologi yang menjadikan produktivitas sebagai tujuan utama pertanian, dengan mengabaikan tujuan lain. Hal ini nampak jelas, dalam program Revolusi Hijau, dimana selain hasil yang tinggi, faktor lingkungan, keekaragaman hayati, konservasi dan keselamatan keberlanjutan pertanian diabaikan.

Pemujaan produktivitas yang berlebihan dengan meletakkan benih unggul, pupuk dan pestisida sebagai determinan kunci pada gilirannya melupakan bahwa persoalan pangan bukan semata soal produktivitas, tetapi juga soal manajemen insitusi menyangkut distribusi, pengairan, inovasi teknologi lain dsb. Amartya Sen, ekonom India penerima nobel, dalam satu studi kasusnya di tahun 1980-an menemukan satu daerah di India mengalami kelaparan hebat, tetapi di daerah lain berkelimpahan pangan. Terbukti kelaparan, menurutnya, bukan soal sekedar kelangkaan pangan (karena teknologi rendah), tetapi juga soal kepemilikan dan akses terhadapnya (Wacana ELSPPAT, edisi 3, 1996).

Syariffuddin Karama, staf ahli Menteri Pertanian RI, dalam Seminar Standarisasi PO di Bogor Juli 2001, pernah menyebutkan adanya inefisiensi pengelolaan irigasi Indonesia. Efektivitas pengairan di Indonesia hanya sekitar 15% pada musim hujan, dan 4% pada musim kemarau. Sementara di India, baik musim hujan dan kemarau efektivitasnya mencapai 40%. Dengan pengairan tersebut, produksi jagung per ha di India mencapai 10 ton, sedang ubi kayu mencapai 60 ton per ha. Bandingkan dengan Indonesia yang hanya 4 ton/ha untuk jagung dan 15 ton/ha untuk ubi kayu. Jelas,

Jadi, keraguan bahwa PO tidak menguntungkan secara ekonomis, dapat diredas dengan adanya premium price di tingkat konsumen. Maka tidak mengherankan jika sekarang mulai bermunculan pengusaha PO skala besar di Indonesia. Bahkan tidak sedikit yang merupakan pemain asing seperti Forest Trade (Amerika) di Sumatra dan Maharishi Global Trading (Belanda) di Sulawesi.

Bisnis sebagai Ancaman

Terlepas bahwa mayoritas orang Indonesia, utamanya para birokrat, peneliti dan pembuat keputusan politik pertanian masih menyangsikan PO, secara nyata PO mulai bermunculan. Dan, pemicu utamanya adalah keuntungan ekonomis. Bisnis PO semakin banyak karena menyimpan keuntungan besar. Sebenarnya kalangan birokrat sekarang pun mulai melirik PO, tetapi yang menggerakkan mereka bukan soal kesadaran ekologis tetapi lebih karena negara maju banyak yang mencari. Artinya peluang meraup devisa.

Sebenarnya bisnis dalam PO sama saja bisnis di tempat lain. Yang dicari: keuntungan. Soal lingkungan menjadi sehat adalah 'bonus'. Memang dalam hal ini 'bonus'nya bernilai lebih, karena tidak saja menyerap lapangan kerja baru tapi juga merehabilitasi lingkungan. Dengan demikian bisnis PO memberikan kredit poin tersendiri. Apakah dengan demikian bisnis ini tidak perlu dicermati?

Salah satu watak bisnis kapitalis adalah kehausannya akan profit yang semakin besar. Sehingga jika ada peluang untuk semakin memperbesar keuntungan, segala cara bisa saja menjadi benar. Kecenderungan ini nampak dari perusahaan-perusahaan besar yang perlahan-lahan mencakup perusahaan bisnis kecil, dan lama-lama menjadi perusahaan besar skala nasional, dan ujungnya menjadi perusahaan multi nasional. Bidang usahanyapun kian melebar, mulai dari

WACANA ELSPPAT Edisi 29/VI Oktober 2003

bisnis hulu sampai hilirnya. Contohnya banyak, diantaranya Monsanto, TNC yang tidak saja berbisnis benih tapi juga farmasi/pestisida.

Di sektor PO gejala ini juga sudah terjadi. Di California, misalnya, awalnya PO dikerjakan oleh petani skala kecil dan dijual oleh pedagang dan ritel kecil independen. Namun sekarang, Wild Oats, perusahaan ritel skala besar, perlahan-lahan mulai mengambil alih peran pedagang kecil dan diserap kedalam jaringannya. Muncullah monopoli, dimana Wild Oats kini memiliki tak kurang dari 105 supermarket PO di seluruh California (Jolly, 2000). Para pedagang kecil jika mau bertahan harus bergabung ke Wild Oats. Tak terasa telah terjadi marginalisasi industri kecil PO oleh konglomerat besar. Pada gilirannya, kejadian ini tidak saja menyebabkan struktur pasar yang tidak bersaing sempurna (kompetitif) tetapi juga memperlebar jurang distribusi pendapatan kesejahteraan.

Di Indonesia, konglomerat Setiawan Djodi mendirikan Bio-Kantata, sebuah perusahaan pupuk organik di Pasuruan, Jawa Timur. Perusahaan ini bekerjasama dengan kelompok petani, dengan dukungan pupuk dari perusahaan dan menjamin pasarnya, untuk membudidayakan padi organik. Dalam kerjasama ini petani diuntungkan. Kini, perusahaan ini mulai menjalin jaringan kerjasama dengan berbagai kelompok tani di Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Nampak semuanya baik-baik saja. Petani diuntungkan, lingkungan juga menjadi sehat. Tetapi, perlu dicermati, ketika suatu perusahaan mengelola sarana produksi, mengkoordinir budidaya dan memasarkan hasil (menguasai hulu sampai hilir) akan memiliki kekuatan yang dominan dalam pengambilan keputusan. Petani kemudian hanya menjadi pelaksana teknis dari agribisnis perusahaan tersebut. Petani menjadi tergantung, karena input dan pasarnya dijamin. Tanpa sadar, petani akan menjadi buruh di lahannya sendiri. Mungkin kesejahteraan petani lebih baik, tetapi

perbaikan manajemen irigasi mampu meningkatkan produktivitas tanpa harus mengubah perilaku pemupukan.

Penemuan system rice of intensification (SRI) oleh Henri de Lauline, seorang Jesuit di Madagaskar, ternyata mampu meningkatkan produktivitas tanaman padi hingga mencapai 8 ton per ha, bahkan diantaranya ada yang mampu mencapai 10-15 ton per ha. SRI tidak mensyaratkan benih unggul atau pemupukan intensif, tetapi lebih menekankan pada perilaku transplantasi bibit, jarak tanam, dan waktu pengairan yang tepat berdasarkan pengamatan terhadap perilaku dan kehidupan tanaman padi (ECHO Development Note, Issue 70, Januari 2001). Artinya, inovasi teknologi seperti ini mampu mengatasi pesimisme Malthusian.

PO Anti Teknologi?

Argumen bahwa PO adalah pertanian masa lalu, yang tradisional, subsisten dan tidak produktif, berakar dari cara pandang modernisme. Sekarang ini ada tuduhan, bahwa kearifan tradisional (pertanian cara lama) adalah anti teknologi (modern), sehingga mengartikan PO seolah identik dengan anti teknologi dan menghambat kemajuan. Bahwa dalam praktik pertanian tradisional (PO) ada faktor inefisiensi adalah hal yang wajar. Tetapi, mengabaikan faktor kearifan lokal, budaya dan tujuan non produktivitas adalah solusi yang tidak bijak.

Perlu diluruskan juga, bahwa PO tidak anti teknologi. Pertanian organik juga bukan pertanian jaman baheula dan mau kembali ke tradisi kuno. Namun, pertanian organik adalah pertanian yang beranjak dari paradigma holistik dalam memandang alam semesta. Dalam cara pandang ini manusia menjadi bagian dari alam dan tujuan terbesar dari praksis pertanian adalah untuk

situasi ini tidak mengubah kondisi petani dari ketergantungan terhadap pihak luar. Struktur pasar yang bersaing sempurna pun menjadi sulit terjadi dalam situasi demikian. Demokrasi ekonomi menjadi utopia dalam kenyataan ini.

Kondisi diatas menyiratkan kekuatiran bahwa PO kedepan (mungkin) hanya akan menyelesaikan persoalan ekologi, tetapi tidak membebaskan petani. Situasinya menjadi tidak berbeda dengan era revolusi hijau, yang membedakan dulu tergantung pada perusahaan input kimia, sekarang pada perusahaan input organik. Selain itu, demokrasi ekonomi juga semakin sulit manakala perusahaan raksasa menguasai hulu hingga hilir seluruh rantai bisnis.

Dalam skala global, kecenderungan TNC untuk melap semua peluang ekonomi sudah sangat jelas. Modus mereka tidak saja menelan langsung perusahaan kecil di seluruh dunia, tapi juga menggunakan mulut dan tangan pemerintah. Mereka berdiri di belakang perjanjian perdagangan internasional dan kelahiran WTO, berinvestasi jutaan dollar di International Funds Institutions (IFIs), dengan mendagangkan globalisasi kesejahteraan. Terlepas apapun yang mereka lakukan, yakinlah bahwa profit adalah tujuan utama mereka.

Bisnis PO, sebagaimana di tempat lain, karenanya perlu diawasi. Perkembangan dan perjuangan PO bukan sekedar isu ekologi dan kesejahteraan petani, tetapi juga soal demokrasi ekonomi, soal kontrol dan akuntabilitas publik perusahaan swasta besar yang menentukan nasib hidup banyak orang.

Epilog

Pertanian Organik kini masih disangsikan kemampuannya dalam memberikan produktivitas yang tinggi oleh banyak orang dan kalangan. Karenanya tidak dipercaya memecahkan soal pertanian dan kecukupan pangan masa depan. Juga, masih diragukan sebagai peluang bisnis yang

keberlanjutan alam semesta. Pemenuhan pangan adalah bagian intrinsik dalam keberlanjutan alam semesta itu sendiri. Dalam kerangka ini, pengembangan teknologi haruslah mengindahkan segala aspek kehidupan dalam keseimbangan dan keberlanjutan alam semesta. Tradisi lama atau kearifan lokal dirujuk dalam PO, lebih karena sumbangannya dalam paradigma holistik yang menghargai keselarasan alam, dibandingkan karena teknologinya.

PO Tidak Menguntungkan ?

Argumentasi lain menyangkut pesimisme PO adalah karena usaha PO dianggap tidak menguntungkan. Memang dalam jangka pendek, PO dengan kondisi teknologi yang sama sementara perilaku pemupukan lebih rendah, akan memberikan hasil kurang optimal dibanding budidaya konvensional. Tetapi jika dikombinasikan pemakaian pupuk organik, pengendalian organisme pengganggu tanaman secara baik, dengan inovasi teknologi (seperti SRI, misalnya) yang tepat akan mampu memberikan hasil yang relatif sama. Yang pasti, dalam jangka panjang PO memberikan jaminan akan kualitas tanah dan ekosistem lokal yang lebih baik. Pengalaman Yayasan Bina Sarana Bakti, di Cisarua telah membuktikan hal ini setelah 15 tahun bergelut di bidang PO.

Ilustrasi dalam bagian pertama tulisan ini telah mengindikasikan bahwa ketika permintaan meningkat maka nilai keuntungan akan membayangi. Kelangkaan barang dalam ilmu ekonomi akan diikuti dengan kenaikan harga. Produk PO sekarang menjadi produk eksklusif yang dicari. Dengan banyaknya permintaan otomatis nilai jual ekonomis produk PO ikut naik. Inilah daya tarik PO dunia sekarang ini.

WACANA ELSPPAT Edisi 29/VI Oktober 2003

menjanjikan di masa kini dan masa depan. Ini wajar, karena belum cukup banyak bukti PO berhasil membuka mata mereka.

Dalam kenyataannya, meski pelan, PO terus bertumbuh. Pendorong utamanya adalah kekuatan bisnis, selain permintaan yang besar. Mengingat watak bisnis kapitalis yang serakah dan tak kenal henti akan keuntungan, maka bisnis PO perlu diawasi, utamanya yang besar. Persoalan PO kemudian bukan saja soal lingkungan yang lebih baik atau soal kesejahteraan ekonomi petani, tetapi juga menyangkut demokrasi ekonomi.

Dengan demikian, menjadi jelas bahwa perjuangan dan pengembangan PO, bukan sekedar soal bagaimana petani menjadi lebih sejahtera atau lingkungan menjadi sehat, tetapi juga soal demokrasi ekonomi, soal perubahan paradigma, soal pembebasan manusia. Peduli PO berarti peduli pada seluruh dan kelanjutan kehidupan ♣

Versi lengkap artikel ini pernah dimuat di bulletin PRO-ORGANIK, Konphalindo tahun 2002

Referensi

Hamm, Ulrich, Prof. dan Michelsen, Johannes, Ph.D. *Analysis of the organic food market in Europe. Paper dalam Prosiding Konferensi Ilmiah IFOAM di Swiss, 2000*
Jolly, Desmond. *From cottage industry to conglomerates: the transformation of the US organic food industry. Paper dalam Prosiding Konferensi Ilmiah IFOAM di Swiss, 2000*

WACANA ELSPPAT Edisi 29/VI Oktober 2003